

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Asshidiqie, Jimly, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Cohen, Carl and James P. Sterba, 2003, *Affirmative Action and Racial Preference : A Debate*, Oxford University Press, Oxford.
- Gautama, Sudargo, 1975, *Warga Negara dan Orang Asing*, Penerbit Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Penerbit Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Nasional : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hutagalung, Arie S. dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Paulus, 1983, *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 : Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim, 1985, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purnamasari, Irma Devita, 2014, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Mizan Pustaka, Bandung.
- Santoso, Urip, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Satrio, J., 1998, *Hukum Waris : Tentang Pemisahan Boedel*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soetikno, Iman, 1983, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Utomo, Tri Widodo W., 2002, *Hukum Pertanahan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Navila, Yogyakarta.

Widyosiswoyo, Hariwijaya Soewandi, 1991, *Ilmu Alamiah Dasar*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

## **B. Artikel Jurnal**

Ismail, Azizah, *et al.*, “Factor Affecting the Housing Financing of Bumiputera in Iskandar Malaysia”, *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. 3, No. 11, November 2015.

## **C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Linda, 2015, Hak Waris Isteri Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa terhadap Hak Milik atas Tanah dari Suami Warga Negara Indonesia Pribumi di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Widianto, Arie, 2007, Kepemilikan Hak Milik atas Tanah bagi Warga Negara Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Richo Andi Wibowo, 2017, Preventing Maladministration in Indonesian Public Procurement, *Disertasi*, Doktor Ilmu Hukum, Utrecht University, Utrecht.

## **D. Internet**

Amali, Zakki, “Duduk Perkara Gugatan Larangan WNI Keturunan Punya Tanah di Jogja”, <https://tirto.id/duduk-perkara-gugatan-larangan-wni-keturunan-punya-tanah-di-jogja-el9k>, diakses 8 Desember 2019.

Leong, Triana, “Who are Malaysia's bumiputera?”, <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/who-are-malaysias-bumiputera>, diakses 2 Februari 2020.

Nurazrin, Siti, Noor Suhaiza dan Hasniza, “Development of Malay Reserve Land: A Study Case of Kuantan”, <http://www.pmm.edu.my/zxc/pustaka/writing/data2016/Development%20of%20Malay%20Reserve%20Land.pdf>, diakses 2 Februari 2019.

Sunano, “Ini Penyebab WNI Keturunan di Yogya Tak Bisa Punya Tanah”, <https://republika.co.id/berita/p4v0mx385/ini-penyebab-wni-keturunan-di-yogya-tak-bisa-punya-tanah>, diakses 5 Januari 2020.

Utama, Abraham, “Etnis Cina dan India ihwal larangan pemilikan tanah di Yogyakarta: yang berjuang dan yang nrimo”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44312524>, diakses tanggal 5 Desember 2019.

## **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Instruksi Kepala Daerah Nomor K. 898/I/A/75 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi.

## **F. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor : 60/PUU-XIII/2015, perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Oktober 2016.